

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA: I WAYAN AGUS WIRANATA

NIM: 126232099

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2024

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA: I WAYAN AGUS WIRANATA

NIM: 126232099

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Disusun Oleh:



I Wayan Agus Wiranata
126232099

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing



E.X. Kurniawan Tjakrawala S.E., M.Si., Ak., CA.

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam mewujudkan tata kelola yang baik, dimana Sistem Pengendalian Internal (SPI) menjadi instrumen penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan SPI pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan mengidentifikasi factor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kuesioner SPI yang diisi oleh pejabat terkait dan hasil wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Rote Ndao, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kelemahan SPI seperti kurangnya kompetensi pegawai, pemisahan tugas yang tidak memadai, dan lemahnya mekanisme pemantauan merupakan faktor yang memengaruhi munculnya permasalahan kelemahan SPI pada LHP atas LKPD Kabupaten Rote Ndao. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pengendalian internal melalui peningkatan kompetensi pegawai, pemisahan fungsi yang jelas, dan monitoring yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, COSO, Akuntansi Sektor Publik

ABSTRACT

The management of local government finances plays a crucial role in achieving good governance, with the Internal Control System (ICS) serving as a key instrument to ensure accountability and transparency in financial reporting. This study aims to analyze the effectiveness of ICS implementation in the Rote Ndao Regency Government and identify the factors that hinder its effectiveness. The study employs a qualitative descriptive method using primary and secondary data. Primary data were obtained from ICS questionnaires completed by relevant officials and interviews, while secondary data were sourced from Audit Reports (LHP) on the Rote Ndao Regency's Financial Statements (LKPD), the Semester Audit Summary (IHPS), and the Regional Audit Summary (IHPD) of East Nusa Tenggara Province.

The results indicate that ICS weaknesses, such as insufficient employee competence, inadequate task segregation, and weak monitoring mechanisms, are factors contributing to ICS deficiencies highlighted in the audit reports on the LKPD of Rote Ndao Regency. The study concludes that strengthening internal control through improved employee competence, clear task segregation, and stricter monitoring is necessary to ensure more accountable financial management.

Keywords: Internal Control System, Internal Control System Weakness findings, COSO Framework, Accounting Public Sector

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kekuatan yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan (PPA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Rektor Universitas Tarumanagara;
2. Dr. Sawidji Widodoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Jamaludin Iskak, S.E., M.Si., Ak., CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara;
4. F. X. Kurniawan Tjakrawala, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
5. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao baik dari Bupati, Sekda, Kepala BKAD, dan Kepala SKPD terkait yang telah memberikan dukungannya sepanjang penyusunan tugas akhir ini;
6. Istri, anak, dan keluarga penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan tugas akhir ini; dan
7. Teman-teman dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungannya.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan.

Jakarta, Desember 2024



I Wayan Agus Wiranata

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Sistematika Pembahasan.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1. Kajian Teori.....	6
2.2. Tinjauan Pustaka	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	15
3.1. Objek Penelitian.....	15
3.2. Metode Penelitian	16
3.3. Sumber Data.....	16
3.4. Teknik Pengumpulan Data	17
3.3. Teknik Analisis Data	17
BAB IV PEMBAHASAN.....	18
4.1 Hasil	18
4.2. Pembahasan.....	22
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	23
5.1. Kesimpulan	23
5.2. Saran	24
DAFTAR PUSTAKA	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klasifikasi Permasalahan Kelemahan SPI dalam LHP Tahun 2023

Tabel 2. Permasalahan Kelemahan SPI pada LHP atas LKPD Kabupaten Rote Ndao TA 2023

Tabel 3. Identifikasi Penyebab Permasalahan Kelemahan SPI pada LHP atas LKPD
Kabupaten Rote Ndao TA 2023

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkembangan Opini Audit pada Entitas di Provinsi NTT

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 2 Form Kuesioner COSO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

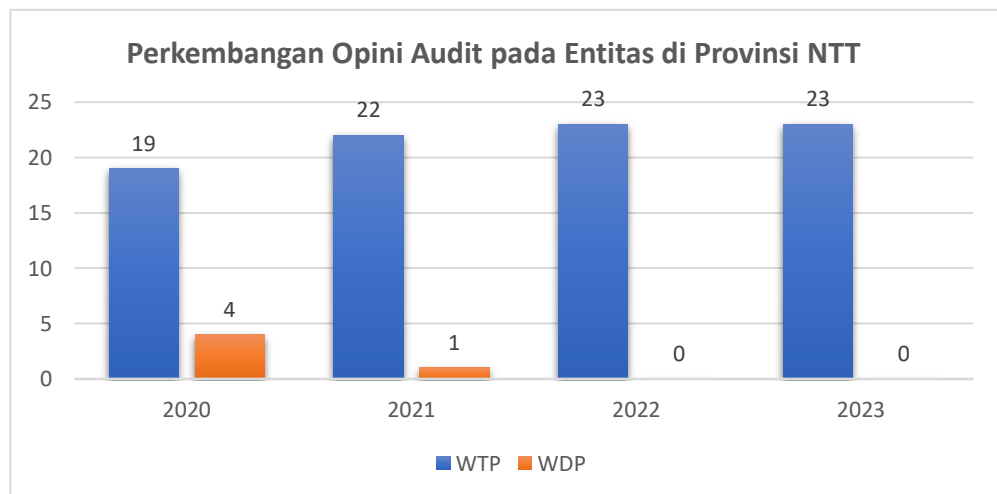
Pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu elemen utama dalam tata kelola ini adalah penyusunan laporan keuangan yang akuntabel, transparan, dan mengikuti standar yang telah ditetapkan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berfungsi sebagai instrumen utama untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, sekaligus menjadi sarana penyampaian informasi terkait kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat serta pemangku kepentingan. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang maksimal, diperlukan sistem pengendalian intern (SPI) yang berfungsi secara efektif di setiap aktivitas pemerintahan. SPI adalah proses berkelanjutan yang melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai dalam berbagai tindakan dan kegiatan. Proses ini dibuat guna memberikan keyakinan memadai untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, termasuk peningkatan efisiensi dan efektivitas, keandalan laporan keuangan, perlindungan aset negara, serta kepatuhan pada regulasi yang berlaku, sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008.

Efektivitas SPI menjadi faktor kunci dalam meningkatkan mutu atau kualitas dari laporan keuangan. SPI yang memiliki mutu baik mencakup berbagai mekanisme, seperti pembagian tugas yang jelas, sistem pelaporan yang terstruktur, serta pelaksanaan pengawasan dan audit internal secara rutin. Dengan penerapan mekanisme ini, SPI dapat berfungsi untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan, ketidaksesuaian, maupun potensi kecurangan yang mungkin terjadi dalam proses pengelolaan dan pencatatan keuangan.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah menjalankan tugasnya dengan berpedoman pada tiga asas utama: desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Di antara ketiga asas tersebut, asas desentralisasi memberikan kewenangan otonomi kepada setiap daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya masing-masing, termasuk dalam hal mengelola keuangan

daerah secara efisien, efektif, akuntabel, dan transparan. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004, pemerintah diwajibkan menyusun serta menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk tanggungjawabnya dalam mengelola keuangan negara. LKPD tersebut harus disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga independen yang memiliki tugas dan tanggung jawab memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai UU Nomor 15 Tahun 2006. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK bertujuan memastikan pengelolaan keuangan negara dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan sesuai peraturan yang berlaku. Pemeriksaan ini juga bertujuan memberikan opini terkait kewajaran informasi yang diungkap dalam laporan keuangan tersebut.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024, menyatakan dari total 546 LKPD yang diperiksa, terdapat 493 LKPD mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, 48 LKPD mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian, 3 LKPD menerima opini Tidak Menyatakan Pendapat, serta 2 LKPD memperoleh opini Tidak Wajar. Dari jumlah tersebut, 23 LKPD berasal dari pemerintah daerah di Provinsi NTT, yang seluruhnya berhasil meraih opini WTP pada laporan keuangan di Tahun Anggaran (TA) 2023. Perkembangan opini audit untuk entitas di Provinsi NTT dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Perkembangan Opini Audit pada Entitas di Provinsi NTT

Disamping memberikan opini, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK juga mengungkapkan berbagai permasalahan yang dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu kelemahan dalam SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam IHPS Semester I Tahun 2024, terdapat

8.078 temuan dengan total 13.271 permasalahan, di mana 5.426 di antaranya berkaitan dengan kelemahan dalam SPI. Permasalahan SPI ini meliputi 1.573 kelemahan pada sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.953 pada sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 900 terkait struktur pengendalian intern. Contoh permasalahan yang mencerminkan kelemahan SPI adalah pencatatan yang tidak dilakukan atau kurang akurat, penyusunan laporan yang tidak sesuai aturan, pelanggaran ketentuan terkait pendapatan dan belanja, serta penyusunan SOP, kebijakan, atau regulasi yang belum memadai atau tidak sesuai.

Berdasarkan data tersebut, sebesar 41% dari permasalahan pada LKPD TA 2023 disebabkan oleh kelemahan SPI. Padahal, SPI seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk meminimalisir potensi temuan atau permasalahan dalam laporan keuangan. Ketidakefektifan penerapan SPI dapat meningkatkan risiko terjadinya kesalahan, ketidakpatuhan, hingga kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Akibatnya, laporan keuangan yang dihasilkan menjadi tidak andal dan berpotensi berpengaruh terhadap opini audit.

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menjadi salah satu entitas pada wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan LKPD kepada BPK. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah memperoleh opini WTP selama empat tahun terakhir. Perolehan opini WTP ini menunjukkan bahwa entitas memiliki komitmen untuk menyajikan LKPD secara wajar dan juga bebas dari salah saji material dengan menerapkan SPI secara efektif.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji efektivitas penerapan SPI di Kabupaten Rote Ndao untuk memahami bagaimana implementasi SPI berkontribusi dalam mengurangi kesalahan dan ketidakpatuhan pada pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada personil kunci di Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan guna memperkaya literatur terkait pengendalian internal dan tata kelola keuangan daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah pengendalian internal yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah efektif?
- b. Bagaimana pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap kualitas LKPD Kabupaten Rote Ndao?
- c. Apakah faktor yang memengaruhi efektivitas pengendalian internal di Kabupaten Rote Ndao?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis tingkat efektivitas pengendalian internal yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
- b. Mengidentifikasi pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap kualitas LKPD Kabupaten Rote Ndao.
- c. Mengidentifikasi serta memberikan rekomendasi solusi terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam penerapan pengendalian internal di Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas SPI sehingga kualitas laporan keuangan dapat meningkat.
- b. Bagi Akademisi
Penelitian ini dapat dijadikan acuan atau literatur tambahan dalam penelitian-penelitian terkait pengendalian internal dan akuntansi pemerintahan.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Bab I memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan;

- b. Bab II memuat kajian teori dan tinjauan Pustaka yang memuat penelitian terdahulu yang mendukung pelaksanaan penelitian;
- c. Bab III menjelaskan tentang objek yang diteliti, metode penelitian yang digunakan, sumber data, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis data;
- d. Bab IV memuat hasil dan pembahasan penelitian yang meliputi hasil wawancara dan informasi yang diperoleh, serta pembahasan dengan mengaitkan informasi tersebut terhadap aspek penelitian;
- e. Bab V memuat kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian serta saran perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Jailani, M. R., & Tjakrawala, F. K. (2023). Analysis of the Effectiveness of Internal Control on the Local Government's Financial Reports in the East Lampung Regency. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 13, 226-234.
- Damayanti, I., & Khotijah, S. A. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Sistem Akuntansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang). *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11, 95-102.
- Kapoh, O. M., Ilat, V., & Warongan, J. D. (2017). Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 213-223.
- Mukti, H. H. (2019). Impementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Perspektif: PP. No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). *Indonesian State Law Review*, 2, 28-43.
- Pitaloka, H., Widayanti, H., Savitri, A. S., Mutohar, & Kabib, N. (2020). Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Dalam Perspektif "COSO" di Desa Kalikurmo Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 01, 1-11.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif* (3rd ed.). Bandung: CV Alfabeta.
- COSO. (2013). *Internal Control-Integrated Framework*. AIGPA's Publication Division.
- BPK RI. (2024). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester Tahun 2024 (IHPS). <https://www.bpk.go.id/>.
- BPK NTT. (2023). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD). <https://ntt.bpk.go.id/ikhtisar-hasil-pemeriksaan-daerah-ihpd/>.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP).